

# OPTIMALISASI PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI KOTA PALOPO SULAWESI SELATAN

Raynhard Surya Ratu

NPP 31.0841

*Asdaf Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: [raynhardratu@gmail.com](mailto:raynhardratu@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Haromin, S.Sos, M.Si

## **Abstrac**

**Problem Statement/Background (GAP):** *In the current era of digitalization, it is essential to adapt to the existing technological advancements, especially in the field of governance. The role of information systems has become crucial in optimizing local revenue reporting, as it facilitates the reporting process for local authorities and enables centralized monitoring by the national government.* **Purpose:** *This study aims to assess the extent to which the Local Government Information System (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah or SIPD), an application developed by the Ministry of Home Affairs based on Ministerial Regulation No. 70 of 2019 regarding Local Government Information Systems, optimizes revenue reporting in Kota Palopo, South Sulawesi.* **Methods:** *The research methodology employed is qualitative-descriptive with an inductive approach. Primary and secondary data were collected through interviews with informants and documentation using purposive sampling techniques. The study identifies ten indicators across four dimensions: Organization, Management, Technology, and Expertise.* **Result:** *The findings reveal that Kota Palopo has implemented the SIPD application to enhance local revenue reporting. However, challenges persist at certain points, necessitating efforts by the Regional Financial and Asset Management Agency (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah or BPKAD) of Kota Palopo and even the Ministry of Home Affairs to address these issues.* **Conclusion:** *In the implementation of revenue reporting optimization through the Local Government Information System (SIPD), several challenges persist. One such challenge is the insufficient understanding among revenue treasurers. Therefore, there is a need for guidance and enhanced comprehension related to revenue reporting via the Local Government Information System (SIPD) to ensure optimal execution of the reporting process.*

**Keywords :** *Regional Government Information System, Regional Revenue Reporting.*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Dalam era digitalisasi seperti saat ini, tentunya perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, tidak terkecuali pada bidang pemerintahan. Peran sistem informasi saat ini sangat penting untuk mengoptimalkan pelaporan pendapatan daerah karena sangat memudahkan setiap penggunanya untuk melaporkan pendapatan daerahnya dan juga akan dengan mudah dipantau oleh pemerintah pusat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mengoptimalkan pelaporan pendapatan daerah di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui wawancara kepada informan dan dokumentasi dengan teknik *Purposive Sampling*. Adapun juga terdapat 10 indikator yang dimuat dari 4 dimensi, yaitu Organisasi, Manajemen, Teknologi, dan Keahlian. **Hasil:** Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Kota Palopo telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi untuk mengoptimalkan pelaporan pendapatan daerah, walaupun pada beberapa titik masih terdapat masalah yang harus dihadapi dan diatasi oleh BPKAD Kota Palopo sendiri bahkan Kementerian Dalam Negeri. **Kesimpulan:** Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan optimalisasi pelaporan pendapatan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman bendahara penerima. Oleh karena itu, diperlukan adanya bimbingan dan pemahaman yang lebih terkait dengan pelaporan pendapatan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga dalam pelaksanaan pelaporan itu sendiri nantinya dapat berjalan secara optimal.

**Kata Kunci :** Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pelaporan Pendapatan Daerah.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kota Palopo mengalami kondisi fluktuatif, dimana pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan pendapatan, dan pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Dari perubahan pendapatan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendapatan Kota Palopo setiap tahunnya pasti berubah-ubah, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah Kota Palopo. Dalam pendapatan yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, anggaran tersebut terbagi menjadi 3, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah. Berdasarkan data pendapatan Kota Palopo yang diperoleh, dari ketiga pendapatan ini yang menerima anggaran paling banyak adalah dari Pendapatan Transfer, yang dimana pendapatan tersebut dianggarkan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Anggaran terbesar setelah Pendapatan Transfer adalah PAD, yang dimana PAD ini dianggarkan dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan PAD Lainnya yang Sah. Dan yang menerima anggaran paling rendah yaitu Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah, yang dimana dianggarkan dari Pendapatan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

Berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa informasi keuangan dan pembangunan daerah wajib untuk disajikan dalam suatu sistem pemerintahan daerah, yang dimana dalam pengimplementasiannya, para pemerintah daerah di seluruh Indonesia menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai alat penunjang dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah masing-masing. Pemerintah daerah diharuskan untuk menyediakan dan mengelola informasi pemerintahan daerah lainnya menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 pasal 4 dan 5. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau yang disingkat dengan SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan, keuangan, dan pemerintahan daerah yang ketiganya saling berhubungan untuk nantinya dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Aplikasi SIPD ini dapat diakses melalui website resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi ini dibangun agar informasi pemerintahan daerah saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Dalam proses penggunaan SIPD ini, yang berkaitan langsung dengan pelaporan dan penginputan hal-hal terkait adalah bendahara penerimaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

Sulawesi Selatan adalah salah satu dari 34 provinsi di Indonesia yang telah memberlakukan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam OPD yang ada di lingkup

pemerintahan. Dalam lingkup pemerintahan di Sulawesi Selatan, OPD telah mulai menggunakan SIPD ini mulai sejak tahun 2020. Kota Palopo menjadi salah satu kota yang menerapkan penggunaan SIPD dalam menunjang pekerjaan di tiap OPD yang ada. Sejak pengumuman pemberlakuan SIPD di Kota Palopo pada tahun 2020, masih banyak OPD yang belum menerapkan penggunaan SIPD, terkhusus di BPKAD Kota Palopo sebagai pengelola keuangan di Kota Palopo. Dari hasil wawancara kecil yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu pegawai di BPKAD Kota Palopo, ditemukan permasalahan bahwa penggunaan SIPD masih belum banyak diberlakukan. Hal ini dikarenakan pengalihan data dari aplikasi sebelumnya ke SIPD belum banyak ditindaklanjuti oleh para bendahara penerima. Alasan mereka belum menindaklanjuti disebabkan karena banyak dari bendahara penerima yang belum paham mengenai tahap penatausahaan di aplikasi SIPD.

Dari identifikasi yang telah dipaparkan, peneliti akan melakukan penelitian terkait pelaporan pendapatan daerah melalui SIPD di BPKAD Kota Palopo sebagai OPD yang bertugas untuk mengelola keuangan daerah di Kota Palopo. Peneliti akan melihat apa saja penyebab belum optimalnya pelaporan pendapatan seperti yang telah dipaparkan, baik itu dari internal aplikasi sendiri yang melibatkan *software* dan *hardware* dalam penggunaan SIPD, maupun dari pegawai yang belum mahir dalam menggunakan SIPD itu sendiri.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan optimalisasi pelaporan pendapatan daerah di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan adalah karena penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo masih tergolong baru sehingga dalam penggunaannya belum mencapai titik yang optimal. Adapun permasalahan selanjutnya yang terjadi ialah pengalihan data dari aplikasi pelaporan pendapatan daerah yang digunakan sebelum Sistem Informasi Pemerintahan Daerah masih belum dipindahkan. Hal ini terjadi dikarenakan para bendahara penerima belum sepenuhnya paham mengenai tahap penatausahaan di SIPD tersebut.

Permasalahan ketiga yang menjadi kesenjangan adalah para bendahara penerima dan pengelola belum paham mengenai pengoperasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara keseluruhan sehingga untuk kualitas pelaporan pendapatan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan sendiri masih belum bisa dikatakan optimal.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Optimalisasi Peningkatan Pelaporan Pendapatan Bendahara Penerima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah memiliki dampak yang besar dan bermanfaat bagi peneliti dalam proses penelitian ini. Penelitian Minta Indah Laoli pada tahun 2022 yang berjudul Implementasi SIPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Nias, ditemukan bahwa

dalam pelaksanaan pelaporan keuangan di Kabupaten Nias masih menggunakan sistem Manual Keuangan Daerah (MAKUDA), yang dimana dasar penetapannya adalah Keputusan Mendagri No. 99 Tahun 1980. Sistem MAKUDA masih menggunakan sistem tata buku Belanda dimana sistemnya masih menggunakan metode *single entry*. Penelitian Tumija pada tahun 2023 yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, ditemukan bahwa ada 3 hasil atau solusi yang diperoleh, yaitu dengan memberikan pelatihan dalam menerapkan SIPD dalam BPKAD Kota Semarang. Yang kedua yang menjadi solusi dalam mengatasi hambatan yaitu dengan cara menjalin kerjasama dengan Dinas Kominfo. Solusi yang ketiga yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pegawai, terkhusus dalam budaya disiplin, professional dan tanggung jawab. Penelitian Muhammad Irfan Nasution pada tahun 2021 dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, dengan hasil bahwa Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan telah mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menerapkan hasil kesepakatan yang diperlukan untuk menyukseskan kegiatan yang menjadi program kerja Pemerintah Kota Medan. Penelitian Dela Alfani pada tahun 2022 dengan judul Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, ditemukan bahwa Penggunaan SIPD sebagai sistem komputerisasi sangat membantu para pegawai untuk memproses anggaran serta perencanaan pemerintah daerah walaupun harus melalui beberapa tahap orientasi kepada beberapa pegawai. Penelitian Chinda Aqhni Adisi pada tahun 2022 dengan judul Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu, ditemukan bahwa Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan SIPD di Kabupaten Indragiri Hulu belum dapat sepenuhnya dikatakan efektif, dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang masih memerlukan aplikasi pendamping dalam melaksanakan prosesnya. Dan juga pada aspek lain masih terdapat error jaringan pada saat penggunaan SIPD sehingga menghambat dalam penginputan data. Penelitian Mahathir Muhammad Iqbal pada tahun 2022 dengan judul Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, ditemukan bahwa Dalam pelaksanaan penggunaan SIPD ini sendiri, masih terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya pemahaman para pegawai dalam mengoperasikan SIPD. Penelitian Nidya Vitriana pada tahun 2022 dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru, ditemukan bahwa Hasil dari penelitian ini adalah penerapan SIPD belum berjalan secara efektif, dikarenakan komunikasi yang kurang efektif dikarenakan sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas daring atau *online*, maka para pegawai merasa kurang paham mengenai penerapan SIPD ini sendiri. Selanjutnya, penelitian Rhandu Inzany pada tahun 2022 dengan judul Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah, Adapun hasilnya adalah

penerapan sudah dilaksanakan secara efektif, baik itu komunikasi dari Kementerian Dalam Negeri, sumber daya manusia, serta penataan struktur organisasi. Penelitian Internasional dari William McCluskey pada tahun 2018 dengan judul *Using Information and Communication Technology to Enhance Local Government Revenue Collection in Tanzania*, Adapun hasilnya adalah Modernisasi dalam mengelola pendapatan ini meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam mengumpulkan pendapatan. Pendapatan teknologi dapat membantu memperlebar kesenjangan informasi pendapatan daerah, yaitu dengan cara memberikan layanan mandiri dengan memprioritaskan keamanan, menerapkan analisis kerja yang tinggi untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap aturan dengan cepat dan efektif, serta memanfaatkan data yang ada untuk meneliti serta meningkatkan kepatuhan terhadap aturan. Dan yang terakhir adalah Penelitian Internasional Sunardi pada tahun 2021 dengan judul *The Role of Government Internal Control System Quality in Moderating the Relationship of Financial Report Quality and Local Government Performance*, Adapun hasilnya adalah kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. dari penelitian ini juga, peneliti yang melakukan penelitian terbatas dalam mengumpulkan data, karena data yang didapatkan tidak berupa informasi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sampel. Serta dari penelitian ini juga, peneliti juga menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana fokus penelitian yang dilakukan yakni pada optimalisasi pelaporan pendapatan daerah melalui aplikasi yang baru dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020 yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penulis melakukan penelitian terhadap seberapa optimal para pengelola SIPD dan bendahara penerima dalam mengelola SIPD terkhusus dalam pelaporan pendapatan daerah Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis juga menggunakan teori Sistem Informasi Manajemen oleh Laudon dan Laudon (2007:17-22).

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan serta meningkatkan pemahaman bendahara penerima BPKAD Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan tentang tata cara pelaporan pendapatan melalui SIPD.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Palopo. Kota tersebut dipilih sebagai lokasi fokus penelitian dan pengumpulan data serta informasi yang diperlukan. Data yang

terkumpul akan diklasifikasikan dan diteliti secara kualitatif untuk memecahkan masalah dan membuat kesimpulan secara induktif. Menurut Lexy J. Moleong (2017), Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi serta tindakan secara menyeluruh dengan menggunakan deskripsi kata-kata atau bahasa dalam konteks yang spesifik dan alami. Ciri-ciri penelitian kualitatif adalah pengujian mendalam metode penelitian kualitatif dengan partisipasi penulis yang bekerja di lapangan. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Penelitian bertujuan untuk penemuan ketika data yang diperoleh dari penelitian tersebut merupakan data yang benar-benar baru dan belum pernah diketahui sebelumnya. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer akan dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara langsung, dan sumber data sekunder akan diperoleh dari bahan bacaan yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis memutuskan untuk menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai informan dalam penelitian ini karena informan dianggap memahami dan mampu memberikan data dan informasi yang akurat. Peneliti juga menetapkan informan karena kewenangan dan tanggung jawab yang mereka miliki terkait dengan masalah yang diteliti. Sugiyono (2016:218) mengemukakan bahwa *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan hal tertentu. Pegawai serta pejabat yang sekiranya dijadikan sebagai informan terkait dengan penelitian ini yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Informasi Keuangan Daerah, serta Bendahara Penerima BPKAD terkait dengan penelitian dan merupakan bagian dari teknik Purposive Sampling sehingga dapat memberikan informasi yang diperlukan serta tepat dan akurat mengenai Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Optimalisasi Pelaporan Pendapatan Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas pelaporan pendapatan daerah dan juga melihat apa saja yang menjadi penghalang dalam mengoptimalkan pelaporan pendapatan daerah melalui SIPD di BPKAD Kota Palopo. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam subbab berikut;

#### **3.1 PEMBAHASAN**

Dengan menggunakan teori Sistem Informasi Manajemen oleh Laudon dan Laudon (2007) dimana terdapat 4 aspek yang diperhatikan dalam optimalisasi pelaporan pendapatan daerah di SIPD, yaitu Organisasi, Manajemen, Teknologi dan Keahlian.

##### **1. Organisasi**

- a. Kebijakan dalam Mengoptimalkan Pelaporan Pendapatan Daerah Melalui SIPD

Kebijakan atau peraturan untuk menerapkan SIPD dibuat oleh Pemerintah Pusat atau, dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri. Dalam pengelolaan keuangan daerah, terdapat lima siklus pengelolaan keuangan, yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Fokus utama dalam konteks ini adalah pelaporan. Pada tahap ini, BPKAD sebagai pelaksana kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri belum sepenuhnya memanfaatkan aplikasi SIPD secara optimal sejak diperkenalkan pada tahun 2020. Keterbatasan pemahaman total terkait penggunaan aplikasi SIPD menjadi kendala. Selain itu, proses migrasi data dari aplikasi sebelumnya (FMIS) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke dalam SIPD juga menghadapi tantangan karena penggunaan aplikasi yang belum dikuasai sepenuhnya.

b. **Budaya Kerja Organisasi 2 Tahun Terakhir**

Dalam tahap pelaporan, BPKAD Kota Palopo telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mengolah laporan pendapatan daerah. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih ada kekurangan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan aplikasi SIPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pelaporan pendapatan daerah dengan SIPD di BPKAD Kota Palopo perlu diperjelas. Sebagai pelaksana kebijakan, BPKAD memiliki kewajiban untuk memberikan informasi tentang penggunaan SIPD dalam mengoptimalkan pelaporan pendapatan daerah dan kondisi yang terjadi selama pelaksanaannya.

**2. Manajemen**

Dalam upaya meningkatkan pelaporan pendapatan, para pegawai di BPKAD Kota Palopo bekerja sama dalam berkoordinasi dan mengumpulkan data serta informasi terkait pendapatan daerah. Data yang dikumpulkan meliputi rincian realisasi penerimaan pendapatan daerah pada tahun sebelumnya. Informasi ini akan menjadi acuan dalam menyusun laporan pendapatan daerah. Manajemen dalam hal ini sangatlah diperlukan dikarenakan kunci keberhasilan dari pelaporan pendapatan daerah ini adalah pengelolaan aplikasi dan pemahaman penggunaan yang struktural dan prosedural. Data dan informasi yang dikumpulkan seringkali tidak sinkron dengan perangkat daerah di Kota Palopo. Dengan diberlakukannya kebijakan menggunakan SIPD ini, dapat dikatakan mengatasi masalah yang terjadi terkhusus dalam tahapan pelaporan pendapatan daerah dikarenakan data dan informasi yang tersedia di SIPD ini sudah tersinkron satu sama lain, khususnya di lingkungan pemerintah Kota Palopo. Manajemen yang dilakukan oleh BPKAD Kota Palopo dalam mengoptimalkan pelaporan pendapatan dapat dikatakan cukup optimal, hal ini dikarenakan data serta informasi yang sudah disediakan di SIPD ini sudah terkoordinasi satu sama lain sehingga dapat mempermudah pekerjaan para bendahara penerimaan untuk menyelesaikan laporan pendapatan daerah.

### **3. Teknologi**

#### **a. Kondisi Jaringan untuk SIPD**

Untuk mengoperasikan SIPD, syarat utama yang harus dipunyai oleh pemerintah adalah memiliki jaringan yang memadai, ini disebabkan karena dalam mengakses SIPD dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, maka untuk dapat berkoordinasi satu sama lain dibutuhkan jaringan yang memadai. Dalam pelaksanaannya, Bendahara penerimaan menghadapi kesulitan dalam mengakses SIPD. Terutama menjelang deadline, akses ke SIPD menjadi sangat sulit. Beberapa bendahara bahkan harus lembur hingga dini hari agar dapat mengakses SIPD dengan lancar. Jika dipaksakan masuk saat server sedang sibuk, risiko kesalahan input data meningkat dan data harus dimasukkan ulang.

#### **b. Perangkat yang Digunakan untuk Mengakses SIPD**

Untuk mengakses SIPD, diperlukan jaringan dan perangkat elektronik yang memadai. Perangkat elektronik yang dimaksud meliputi komputer, laptop, dan perangkat lain yang mendukung. Proses pelaporan pendapatan sebenarnya dapat dilakukan di lokasi mana pun, tidak selalu harus di kantor. Oleh karena itu, untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, tidak selalu harus melalui komputer di kantor. Pegawai, khususnya bendahara penerimaan, dapat masuk menggunakan akun yang disediakan dalam aplikasi SIPD dan mengelola laporan pendapatan daerah. BPKAD telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk memudahkan akses ke SIPD, termasuk perangkat dengan kondisi yang baik.

### **4. Keahlian**

Untuk mengelola dan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, diperlukan keahlian dasar dari para pegawai agar mereka mahir dalam menggunakan teknologi yang relevan dengan zaman sekarang. Jika pegawai sudah terampil dalam mengoperasikan teknologi dengan baik, maka pemahaman dasar terkait penggunaan SIPD akan lebih mudah dipahami. Di BPKAD Kota Palopo, para bendahara penerimaan telah memahami penggunaan teknologi yang sesuai dengan zaman sekarang, termasuk teknologi yang terkait dengan SIPD. Namun, pada tahap pelaporan, mereka masih menghadapi kesulitan karena memerlukan bimbingan lebih lanjut dalam menginput data pelaporan.

Meskipun bendahara penerimaan di BPKAD Kota Palopo memiliki pemahaman tentang penggunaan teknologi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka, proses pelaporan pendapatan melalui SIPD masih memerlukan bimbingan lebih lanjut. Karena SIPD merupakan aplikasi baru, para bendahara perlu memahami lebih dalam tentang penggunaan dan pengelolaannya. Dalam proses pelaporan pendapatan, pengelola sering menghadapi berbagai kesulitan. Untuk mengatasi masalah ini, mereka berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain atau mencari solusi melalui video di platform YouTube.

### 3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaporan pendapatan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini seharusnya menciptakan kemudahan dalam mengelola dan mengkoordinasikan pendapatan daerah dengan seluruh daerah yang ada di Indonesia, dikarenakan penggunaan sebelumnya yang masih menggunakan FMIS yang dimana masih belum terkoordinasi dengan daerah lainnya. Namun, yang menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pelaporan pendapatan daerah adalah para bendahara penerima belum sepenuhnya mengerti mengenai tata cara pelaporan dan penatausahaan pendapatan daerah sehingga dalam hal ini penggunaan SIPD masih belum terlaksana secara optimal.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Nasution pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, pada penelitian sebelumnya melakukan analisis terhadap seluruh aspek siklus pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD, sedangkan untuk penelitian yang penulis lakukan hanya berfokus terhadap optimalisasi pelaporan pendapatan daerah melalui SIPD itu sendiri.

Dalam penggunaan SIPD ini, kolaborasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan optimalisasi pelaporan pendapatan daerah dikarenakan dalam mengoptimalkan pelaporan pendapatan daerah, dibutuhkan koordinasi yang baik secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga secara horizontal antara pemerintah daerah yang ada di Indonesia.

## IV. KESIMPULAN

Optimalisasi pelaporan pendapatan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Palopo telah mencapai tingkat yang memadai. BPKAD menjalankan operasional SIPD sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, mempermudah transparansi dan koordinasi dalam pelaporan pendapatan daerah. Namun, kendala teknologi dan kebutuhan bimbingan teknis masih dibutuhkan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam waktu penelitian sehingga pada penelitian ini hanya berfokus pada pelaporan pendapatan, tidak kepada seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penelitian yang dilakukan kali ini masih dalam lingkup pengoptimalan pelaporan pendapatan, penulis berharap agar bisa melakukan penelitian selanjutnya dengan melibatkan seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menemukan hasil yang lebih dalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo beserta seluruh perangkat kerja yang ada didalamnya yang telah

memberikan dukungan penuh kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, terkhusus juga kepada Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Informasi Keuangan Daerah, serta Bendahara Penerimaan BPKAD yang telah membantu penulis memberikan keterangan yang akurat dalam melakukan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alfani, D. (2022). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3496>
- Adisi, C. A. (2022). *Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu*. Universitas Riau. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.581>
- Iqbal, M.M. (2022). *Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Universitas Islam Raden Rahmat Malang. <https://doi.org/10.33474/jisop.v3i2.11192>
- Laoli, M. I. (2022). *Implementasi SIPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Nias*. Universitas Nias. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43987>
- Laudon, K. C. (2007). *Sistem Informasi Manajemen: Mengelola Perusahaan Digital*. Yogyakarta: ANDI.
- McCluskey, W. (2022). *Using Information and Communication Technology to Enhance Local Government Revenue Collection in Tanzania*. University of Pretoria. <https://www.up.ac.za/media/shared/223/Working%20Papers/ict-and-revenue-collection-in-tanzania.-mccluskey-et-al.zp166260.pdf>
- Nasution, M. I. (2021). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <http://dx.doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Nurdin, Ismail & Hartati, Sri. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia Pondok Maritim.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, (2019).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunardi. (2021). *The Role of Government Internal Control System Quality in Moderating the Relationship of Financial Reports Quality and Local Government Performance*. Universitas Trisakti. <https://doi.org/10.47191/afmj/v6i6.03>
- Sutabri, T. (2013). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI.

Tumija. (2023). *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3389>

